

# Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Pemerintah Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Oleh :

Wulan Novitasari

Dra. Isnaini Rodiyah, M.Si

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September 2023

# Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran LPMD dalam Pembangunan pemerintah desa Watesnegoro kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang meliputi kepala desa, ketua LPMD, sekretaris desa, bendahara desa, dan kaur perencanaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara, pencatatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa (LPMD) Watesnegoro masih belum bisa dikatakan baik atau belum maksimal dan masih kurangnya antusias warga dalam mendukung berjalanya pembangunan desa sesuai program atau kegiatan yang di sediakan LPM desa Watesnegoro. fasilitator LPM desa Watesnegoro mampu melaksanakan programnya dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan keterampilan masyarakat agar program LPM desa watesnegoro dapat berjalan secara efektif dan efisien, motivator dan dinamisator mampu mendorong Masyarakat untuk melakukan apa yang mereka bisa, meningkatkan kreatifitas dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat desa Watesnegoro, mediator disini sebagai jembatan antara pemerintah desa dengan Masyarakat desa .Mediator juga berperan dalam mensosialisasikan perencanaan program kerja yang akan dilaksanakan pemerintah desa. Faktor yang mempengaruhi peran LPMD antara lain umur dan Pendidikan.

# Pendahuluan

Tujuan pembangunan suatu negara pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan merupakan salah satu aspek yang sangat menunjang pembangunan negara. Keberhasilan pembangunan suatu negara diukur dari pembangunan yang berkeadilan yang mencakup seluruh wilayah, dan partisipasi masyarakat juga penting dalam pembangunan kehidupan pedesaan, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang kemudian disebut dengan otonomi daerah. Konsep ini dimaksudkan agar kebijakan pembangunan yang dikuasai oleh pemerintah pusat kemudian dapat diturunkan kepada pemerintah daerah itu sendiri untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan. Pemerintah sebagai salah satu unsur pembentuk negara memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerintahan mengalami proses perkembangan sebagai akibat perkembangan negara sebagai jawaban atas dinamika masyarakat. Jika kebijakan otonomi daerah yang dijalankan pemerintah dilanjutkan pada titik ini, maka jelas akan ada otonomi yang luas untuk mengatur pemerintahan menurut pengambilan keputusan di setiap situasi daerah, yang akan meliputi aspek pemerintahan selain kekuatan keamanan pertahanan, yaitu peradilan, fiskal, agama, serta tugas aspek lainnya yang diatur oleh peraturan pemerintah.

# Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Lembaga Perberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Pemerintah Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

# Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Adapun alasan peneliti mengambil lokasi di Desa Watesnegoro, karena peneliti melihat fenomena bahwa pemerintah desa Watesnegoro secara keuangan mengalami penurunan pendapatan oleh karena itu perlu dipertanyakan bagaimana fungsi LPMD sebagai salah satu lembaga desa guna meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Dalam penentuan informan adalah selaku narasumber yang dipergunakan untuk memenuhi data, memahami permasalahan yang akan diteliti, dan kesediaan untuk memberikan sebuah informasi secara akurat, jelas, dan lengkap. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik dalam penentuan sampel. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan yaitu purposive sampling, adapun informan tersebut meliputi Kepala Desa Watesnegoro dan Ketua LPMD selaku informan, Sekretaris Desa selaku informan, Bendahara Desa selaku informan, Kaur Perencanaan selaku informan yang mampu menjadi informan utama dalam menyampaikan. Jenis data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

# Hasil

Hasil dalam penelitian menggambarkan tentang peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) dalam pembangunan di pemerintah desa watesnegoro kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yang berdasarkan tugas dan fungsinya yang tertera dalam undang-undang nomor 06 tahun 2014 yaitu berperan dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa dan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa. LPMD sebagai mitra kerja desa dituntut untuk dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mendorong swadaya masyarakat agar dapat memajukan pembangunan desa. Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan dimana setiap desa diamanakan untuk mendirikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Dimana LPMD merupakan Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan desa. Fungsi dan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai mitra Pemerintah adalah memberikan dan meningkatkan rasa, kebersamaan, persatuan dan kesatuan di desa/masyarakat Kelurahan. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Adapun 5 indikator peran yang dapat dijelaskan. Adapun indikator tersebut adalah peran sebagai Dinamisator, fasilitator, mediator dan motivator.

# Pembahasan

- Peran sebagai Dinamisator

Peran Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPMD) sebagai Dinamisator adalah Mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPMD) seharusnya lebih bijaksana dalam memantau serta melihat berbagai kegiatan kegiatan serta program yang ada di lingkungan masyarakat. Selain harus bijaksana pemantauan kegiatan masyarakat, LPMD juga diharapkan untuk bisa menempatkan dirinya ditengah masyarakat dan mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam bidang pemberdayaan yang dibuat oleh LPMD. Maka dari itu lembaga pemberdayaan masyarakat harus mampu melakukan pendampingan serta memberikan solusi disetiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

- Peran sebagai Fasilitator

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai fasilitator yang di maksud adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Watesnegoro mampu memfasilitasi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan bidang pembangunan yang di peruntukkan oleh masyarakat itu sendiri. Selain dari pada itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Watesnegoro Juga harus mampu mendampingi dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan keterampilan masyarakat agar program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berperan sebagai fasilitator didesa dalam memfasilitasi segala kegiatan masyarakat terhadap perencanaan program pembangunan dan selanjutnya akan direalisasikan. LPMD juga berperan dalam mengusulkan pembangunan dan melakukan kolaborasi dengan elemen masyarakat dalam merancang usulan pembangunan. Selain itu pengurus LPMP juga berperan untuk menampung aspirasi masyarakat serta mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan program kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan, pengurus LPMP Desa Watesnegoro merancang program bersama masyarakat yang dilakukan melalui rapat atau musyawarah dengan pihak kelurahan dan beberapa perwakilan masyarakat yaitu tokoh agama, tokoh adat, serta RT/RW.



# Pembahasan

- Peran sebagai Mediator

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa (LPMD) sebagai mediator dalam pembangunan maksudnya adalah untuk mensosialisasikan beberapa hasil usulan dari realisasi pemberdayaan masyarakat desa Watesnegoro yang sudah di tetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan Desa terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPMD waresnegoro mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga dan juga melalui bentuk undangan rapat. Selain itu Peran pengurus LPM sebagai mediator pada hakikatnya merupakan mensosialisasikan hasil-hasil usulan atau rancangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang telah ditetapkan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini termasuk di dalamnya sosialisasi kegiatan seperti pihak-pihak yang diakan diminta partisipasi dan keterlibatannya

- Peran sebagai Motivator

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai motivator berarti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dapat mendorong masyarakat desa untuk berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kreativitas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Motivator dipandang sebagai pemimpin dan pelopor pembangunan, sehingga tantangannya adalah menciptakan motivator pemberdayaan masyarakat. Insentif tersebut dapat berupa tokoh masyarakat atau seluruh aparat pemerintah di desa, bahkan di tingkat kabupaten dan kota. Banyak hal yang harus dipersiapkan, antara lain persiapan ketahanan pribadi, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosial, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosial, kemampuan mengajak, menggerakkan, menjembatani dan kemampuan menjadi fasilitator. Jadi peran motivator sangatlah penting dan strategis. Pembangunan desa diwujudkan melalui kerjasama instansi terkait dan masyarakat. Sebab misi LPMD sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi tempat memfokuskan upaya masyarakat. Partisipasi masyarakat yang rendah pun dianggap rendah apabila masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan dan menyukseskan pembangunan LPMD.



# Temuan penting penelitian

- Peran yang dilakukan oleh LPMD desa watesnegoro kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dalam membangun pemerintah desa cukup baik dan membawa dampak yang positif terhadap masyarakat desa watesnegoro terutama dalam bidang perekonomian.
- Partisipasi masyarakat desa watesnegoro terhadap peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) dalam upaya untuk pembangunan pemerintah desa masih belum dikatakan cukup baik.

# Manfaat penelitian

- Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memperluas ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran Administrasi Publik khususnya mengenai studi tentang pembangunan pemerintah desa

# Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan atas masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan permasalahan penelitian sebagai berikut Peran yang dilakukan oleh LPMD desa watesnegoro kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dalam membangun pemerintah desa cukup baik dan membawa dampak yang positif terhadap masyarakat desa watesnegoro terutama dalam bidang perekonomian. Namun dalam mengupayakan untuk membangun atau mengembangkan perekonomian desa pemerintah desa watesnegoro memiliki kendala atau permasalahan yaitu sumber daya manusia yang masih rendah sehingga hal itu berpengaruh dalam upaya LPMD dan Pemerintah desa watesngeoro kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto untuk menginisiasi program-program baru yang berkaitan dengan pemberdayaan perekonomian, dan menyebabkan masyarakat sulit untuk diajak melakukan perubahan dan berinovasi untuk mendapatkan pendapatan desa dari sektor lain. Dan Partisipasi masyarakat desa watesnegoro terhadap peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) dalam upaya untuk pembangunan pemerintah desa masih belum dikatakan cukup baik. masih banyak kurangnya partisipasi masyarakat desa watesnegoro dalam membantu upaya LPMD watesnegoro untuk membangun sebuah pemerintah desa yang baik. Hal tersebut sangat disayangkan dikarenakan upaya atau peran LPMD di pemerintah desa watesnegoro kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto kurang mendapatkan dukungan atau partisipasi oleh masyarakat.

# Referensi

- [1] S. G. Somali, P. Studi, and I. Pemerintahan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, vol. 6. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- [2] Aini Shalihah, "Implementasi Aupb Di Bidang Tata Kelola Infrastruktur Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Sokolelah Dan Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan," *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA*, 2022.
- [3] P. Polyando, "Menelusuri duduknya ilmu pemerintahan," *J. Polit.*, vol. 3, no. 01, pp. 39–50, 2016.
- [4] Sugiyanto, *Urgensi dan Kemandirian Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2017.
- [5] S. dkk Hajar, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, vol. 4, no. 1. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018.
- [6] A. R. Fika, "KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Pelayanan Administrasi di Desa Samberan Kecamatan Kanor ...." Available SSRN 4182216, vol. 22, 2022, [Online]. Available: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4182216](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4182216).
- [7] A. Fratama, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur," *eJournal Ilmu Pemerintah.*, vol. 9 (1), no. 1, pp. 61–74, 2021.
- [8] I. G. A. S. Dana, Ida Ayu Putu Widiati, and I wayan arthanaya, "Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Mewujudkan Pembangunan Desa di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem," *J. Prefer. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 324–329, 2022, doi: 10.55637/jph.3.2.4938.324-329.
- [9] R Purwaningsih, "PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DAN PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi pada Desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)," *Sigma Kebijak. Publik*, vol. 21, no. 4, p. 23, 2021.
- [10] Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 54 Tahun 2013 Pasal 1 Tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM)
- [11] Asmawati, "PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DESA" (Studi di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang), Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2020
- [12] Abid Muhtarom, "LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA DI KABUPATEN LAMONGAN PERANAN" Universitas Islam Lamongan, 2018
- [13] Moirongo Laila, Besti Rohana Simbolan "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo" Universitas Darma Medan, 2022
- [14] Ikbar, "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat Di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar" Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018
- [15] Indriyani "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis" Universitas Islam Riau, 2022
- [16] Aprilia Restiani, Azhar, Dafetta Fitri Linda, "Peran Pengurus Lembaga Kesejahteraan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singing Kabupaten Kuantan Singing"

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO

